

ABSTRAK

Uni Eropa (UE) bergantung pada impor minyak kelapa dari Asia Tenggara untuk kebutuhan industri makanan, kosmetik, dan oleokimia. Namun, akses ke pasar ini kian diperketat oleh berbagai aturan, mulai dari standar keamanan pangan (HACCP dan batas kontaminan), sertifikasi keberlanjutan, hingga kewajiban uji tuntas di bawah EU Deforestation Regulation (EUDR, Regulasi EU 2023/1115). Penelitian ini menganalisis bagaimana rantai pasok minyak kelapa di Indonesia dan Vietnam beradaptasi terhadap regulasi UE serta dampaknya terhadap akses pasar dan daya saing ekspor. Menggunakan desain dominan kualitatif dengan dukungan data statistik sekunder, penelitian ini mengombinasikan analisis dokumen regulasi, data produksi dan perdagangan dari FAOSTAT dan CBI, serta wawancara mendalam dengan eksportir asal Indonesia, Heaven Coconut Global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur petani kecil yang terfragmentasi di Indonesia (produksi 646.000 ton pada 2023) dan Vietnam (produksi 182.000 ton pada 2023) menjadi hambatan utama dalam memenuhi standar keterlacakan lahan (plot level traceability) EUDR. Bukti lapangan dari Heaven Coconut Global memperlihatkan adanya kesenjangan kesiapan operasional pada eksportir skala menengah kecil, yang masih mengandalkan pencatatan tingkat batch sederhana, pemahaman EUDR tingkat awal, serta ketergantungan pada mitra pemrosesan. Di sisi lain, bergesernya pasar UE ke produk olahan bernilai tambah, meningkat dari 33% pada 2019 menjadi 46% pada 2023, menjadikan pemenuhan standar keterlacakan dan keberlanjutan sebagai syarat mutlak untuk menembus segmen pasar bernilai tinggi. Studi ini merekomendasikan penerapan keterlacakan digital secara bertahap bagi eksportir, pembentukan platform keberlanjutan kelapa nasional dan layanan penyuluhan bagi pemerintah, serta jalur kepatuhan yang lebih fleksibel dari regulator UE.

Kata Kunci: Minyak Kelapa, Kepatuhan Rantai Pasok, EU Deforestation Regulation (EUDR), Keterlacakan (Traceability), Standar Keberlanjutan, Indonesia, Vietnam.